E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5563-5570
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud dengan Penalaran Moral sebagai Variabel Moderasi

Rinto Syahdan[1], Livi Meiga Puteri[2], Sheila Kusumaningrum[3]

[1,2,3] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun
e-mail: rinto@unkhair.ac.id , livimeiga@unkhair.ac.id, sheila11@unkhair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh good governance, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud, serta menguji peran penalaran moral sebagai variabel moderasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate. Urgensi penelitian ini didasari oleh tingginya kerentanan penyimpangan pengelolaan anggaran di sektor publik daerah, sehingga dibutuhkan identifikasi faktor determinan serta kesiapan etis aparatur dalam mencegah kecurangan sejak dini. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap aparatur pada 32 OPD. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria aparatur yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan dan pengawasan internal. Dari 160 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 130 kuesioner lengkap dapat diolah. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 4 melalui tahapan evaluasi model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Hasil pengujian menunjukkan bahwa good governance, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Penalaran moral memoderasi secara positif hubungan whistleblowing system dengan pencegahan fraud, sedangkan interaksi penalaran moral dengan sistem pengendalian internal dan budaya organisasi signifikan dengan arah negatif. Sebaliknya, penalaran moral tidak memoderasi hubungan good governance dengan pencegahan fraud. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud memerlukan integrasi mekanisme tata kelola, pengendalian, pelaporan, budaya integritas, dan kapasitas moral aparatur. Secara praktis, hasil studi ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan saluran pelaporan yang aman sekaligus memperkuat pelatihan etika profesi guna meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pencegahan Fraud, Good Governance, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Penalaran Moral.

Abstract

This study analyzes the effect of good governance, internal control systems, organizational culture, and whistleblowing systems on fraud prevention, as well as examining the role of moral reasoning as a moderating variable in the Regional Apparatus Organizations (OPD) of Ternate City. The urgency of this research is grounded in the high vulnerability of budget management irregularities within the regional public sector, necessitating the identification of determinant factors and the ethical readiness of officials to prevent fraud at an early stage. This research employs a quantitative approach through a survey of officials across 32 OPDs. Respondents were selected using a purposive sampling technique based on the criterion of officials directly involved in financial management and internal supervision processes. Out of 160 distributed questionnaires, 130 completed questionnaires were valid for processing.

Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4 through the evaluation stages of the measurement model (outer model) and structural model (inner model). The test results indicate that good governance, internal control systems, organizational culture, and whistleblowing systems have a positive and significant effect on fraud prevention. Moral reasoning positively moderates the relationship between the whistleblowing system and fraud prevention, whereas the interaction of moral reasoning with internal control systems and organizational culture is significant in a negative direction. Conversely, moral reasoning does not moderate the relationship between good governance and fraud prevention. These findings demonstrate that fraud prevention requires the integration of governance mechanisms, control, reporting, a culture of integrity, and the moral capacity of officials. Practically, the results of this study recommend that the local government optimize secure reporting channels while simultaneously strengthening professional ethics training to minimize the potential for abuse of authority sustainably.

Keywords: Fraud Prevention, Good Governance, Internal Control System, Whistleblowing System, Moral Reasoning.

PENDAHULUAN

Fraud merupakan risiko serius bagi tata kelola sektor publik karena dapat menimbulkan kerugian keuangan, menurunkan kualitas pelayanan, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada organisasi pemerintahan daerah, risiko tersebut dapat muncul dalam penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pelaksanaan program, maupun pelaporan keuangan. Association of Certified Fraud Examiners menempatkan fraud sebagai persoalan organisasi yang memerlukan pencegahan, deteksi, dan respons secara sistematis [1]. Dalam konteks Indonesia, skor Corruption Perceptions Index tahun 2024 yang dipublikasikan pada 2025 menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola masih menjadi agenda penting [2].

Di tingkat daerah, penguatan sistem dan prosedur belum selalu menjamin bahwa seluruh proses berjalan secara berintegritas. Naskah penelitian mencatat bahwa Pemerintah Kota Ternate memperoleh skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebesar 91 pada akhir 2025, sedangkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperoleh skor 88,3. Capaian tersebut menggambarkan komitmen kelembagaan, tetapi tetap perlu diuji apakah mekanisme formal telah diterapkan secara efektif pada tingkat organisasi dan perilaku aparatur. Laporan pemeriksaan BPK Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang dirujuk dalam naskah penelitian juga mengindikasikan masih adanya kelemahan pengendalian internal dan kepatuhan pada pengelolaan keuangan daerah.

Agency theory menjelaskan bahwa pendelegasian kewenangan dari principal kepada agent dapat menimbulkan konflik kepentingan dan asimetri informasi [3]. Dalam pemerintahan daerah, aparatur yang mengelola anggaran dan aset memiliki akses informasi serta kewenangan operasional yang dapat disalahgunakan apabila tidak diimbangi pengawasan. Karena itu, good governance, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan whistleblowing system merupakan perangkat kelembagaan yang dapat membatasi peluang fraud. Kerangka pengendalian internal COSO menempatkan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi-komunikasi, dan pemantauan sebagai komponen yang saling terkait [4].

Selain mekanisme kelembagaan, pencegahan fraud dipengaruhi oleh pertimbangan etis individu. Teori perkembangan moral Kohlberg menjelaskan bahwa keputusan moral berkembang dari orientasi kepentingan pribadi dan kepatuhan terhadap aturan menuju prinsip moral yang lebih universal [5]. Penalaran moral dapat menentukan apakah aparatur menjalankan prosedur karena takut sanksi atau karena memahami tanggung jawab etisnya. Sistem pelaporan pelanggaran juga membutuhkan kepercayaan, perlindungan pelapor, dan kemauan individu untuk menyampaikan informasi mengenai penyimpangan [6], [7].

Penelitian terdahulu telah menguji pengaruh pengendalian internal, tata kelola, budaya etis, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud. Namun, temuan mengenai peran faktor individual belum sepenuhnya konsisten. Di satu sisi, moral reasoning dan iklim etis dapat mendorong perilaku pelaporan serta penolakan terhadap pelanggaran [8]. Di sisi lain, mekanisme formal dapat tetap bekerja secara institusional tanpa selalu bergantung pada variasi penalaran moral individu. Perbedaan tersebut menjadi alasan untuk menguji penalaran moral sebagai moderator pada empat hubungan utama dalam konteks OPD Kota Ternate.

Penelitian ini memiliki kontribusi empiris dengan menguji secara simultan empat faktor organisasi—good governance, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan whistleblowing system—serta interaksi masing-masing faktor dengan penalaran moral. Penelitian dilakukan pada 32 OPD Kota Ternate, sehingga memberikan bukti kontekstual mengenai mekanisme pencegahan fraud pada organisasi pemerintah daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh langsung keempat faktor tersebut dan menguji apakah penalaran moral mengubah kekuatan hubungan masing-masing faktor dengan pencegahan fraud.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Lokasi penelitian mencakup 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Ternate. Unit analisis adalah individu aparatur yang terlibat dalam fungsi manajerial, pengelolaan keuangan, administrasi, dan pengawasan. Pemilihan responden dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap tata kelola serta pengelolaan keuangan OPD. Kriteria responden dalam naskah meliputi pimpinan OPD, pejabat pengelola keuangan, sekretaris, bendahara, unsur pengawasan, dan staf dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Sebanyak 160 kuesioner disebarkan pada periode 15 Juni sampai 26 Agustus 2026. Sebanyak 130 kuesioner dikembalikan dalam keadaan lengkap dan dapat dianalisis, sedangkan 30 kuesioner tidak dikembalikan. Dengan demikian, tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah sebesar 81,25%. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert lima tingkat, dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

Variabel independen terdiri atas good governance (X1), sistem pengendalian internal (X2), budaya organisasi (X3), dan whistleblowing system (X4). Variabel dependen adalah pencegahan fraud (Y), sedangkan penalaran moral (Z) berperan sebagai moderator. Instrumen mengukur konstruk melalui indikator yang tercantum dalam proposal penelitian. Model pengukuran dievaluasi menggunakan outer loading, Average Variance Extracted (AVE), Cronbach's alpha, dan composite reliability. Model struktural dievaluasi melalui Variance Inflation Factor (VIF), koefisien determinasi (R^2), serta koefisien jalur dan efek interaksi.

Analisis dilakukan menggunakan PLS-SEM dengan bantuan SmartPLS 4. Signifikansi koefisien jalur dan interaksi diuji melalui prosedur bootstrapping.

HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Pengumpulan Data

Penelitian melibatkan 32 OPD di Kota Ternate. Dari 160 kuesioner yang disebarkan, 130 kuesioner lengkap berhasil dikumpulkan dan digunakan dalam analisis. Tingkat respons sebesar 81,25% menunjukkan bahwa sebagian besar kuesioner yang didistribusikan dapat diolah. Responden merupakan aparatur yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan, administrasi, dan pengawasan sehingga dinilai relevan untuk memberikan penilaian atas mekanisme pencegahan fraud di OPD.

Tabel 1. Tingkat pengembalian kuesioner

Uraian	Jumlah	Persentase
Kuesioner disebarkan	160	100,00%
Kuesioner lengkap dan diolah	130	81,25%
Kuesioner tidak dikembalikan	30	18,75%

Statistik Deskriptif Variabel

Rata-rata penilaian responden menunjukkan bahwa seluruh konstruk berada pada kategori tinggi. Good governance memperoleh nilai rata-rata 3,85; sistem pengendalian internal 3,86; budaya organisasi 3,85; whistleblowing system 3,84; penalaran moral 3,86; dan pencegahan fraud 3,84. Hasil tersebut menggambarkan persepsi positif responden terhadap penerapan tata kelola, pengendalian, budaya integritas, sistem pelaporan, pertimbangan moral, dan upaya pencegahan kecurangan di lingkungan OPD.

Tabel 2. Rata-rata persepsi responden

Variabel	Mean	Kategori
Good Governance	3,85	Tinggi
Sistem Pengendalian Internal	3,86	Tinggi
Budaya Organisasi	3,85	Tinggi
Whistleblowing System	3,84	Tinggi
Penalaran Moral	3,86	Tinggi
Pencegahan Fraud	3,84	Tinggi

Evaluasi Model Pengukuran

Hasil pengujian menunjukkan bahwa outer loading seluruh indikator konstruk berada di atas 0,70. Nilai AVE masing-masing konstruk juga melampaui batas 0,50, yaitu budaya organisasi 0,794; good governance 0,774; penalaran moral 0,791; pencegahan fraud 0,788; sistem pengendalian internal 0,816; dan whistleblowing system 0,761. Dengan demikian, konstruk memenuhi kriteria validitas konvergen.

Tabel 3. Validitas konvergen dan reliabilitas konstruk

Konstruk	AVE	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)
Budaya Organisasi	0,794	0,971	0,973
Good Governance	0,774	0,967	0,969
Penalaran Moral	0,791	0,947	0,947
Pencegahan Fraud	0,788	0,966	0,967
Sistem Pengendalian Internal	0,816	0,981	0,982
Whistleblowing System	0,761	0,955	0,957

Seluruh nilai Cronbach's alpha dan composite reliability berada di atas 0,70. Hal ini menunjukkan konsistensi internal instrumen yang memadai. Oleh karena itu, model pengukuran dinilai layak untuk dilanjutkan pada evaluasi model struktural.

Evaluasi Model Struktural

Pengujian kolinearitas menunjukkan nilai VIF prediktor berada pada rentang 1,335 sampai 5,193. Nilai tertinggi terdapat pada sistem pengendalian internal sebesar 5,193, sedangkan nilai terendah terdapat pada penalaran moral sebesar 1,335. Nilai tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan ambang VIF yang digunakan dalam PLS-SEM; secara umum nilai sekitar 5 merupakan batas kewaspadaan, sehingga konstruk sistem pengendalian internal perlu dicermati, meskipun tidak menunjukkan kolinearitas yang sangat tinggi.

Tabel 4. Nilai Variance Inflation Factor

Prediktor	VIF
Good Governance	5,140
Sistem Pengendalian Internal	5,193
Budaya Organisasi	4,865
Whistleblowing System	4,732
Penalaran Moral	1,335
Z × Good Governance	2,920
Z × Sistem Pengendalian Internal	2,490
Z × Budaya Organisasi	2,715
Z × Whistleblowing System	2,638

Nilai R^2 pencegahan fraud sebesar 0,925 dan adjusted R^2 sebesar 0,919. Artinya, 92,5% variasi pencegahan fraud dapat dijelaskan oleh konstruk prediktor beserta interaksi moderasi dalam model, sedangkan 7,5% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai tersebut menunjukkan daya jelas model yang tinggi pada sampel penelitian.

Pengujian Pengaruh Langsung

Tabel 5. Hasil pengujian pengaruh langsung

Hubungan	Koefisien	t-statistik	p-value	Keputusan
Good Governance → Pencegahan Fraud	0,179	4,349	0,000	Signifikan
Sistem Pengendalian Internal → Pencegahan Fraud	0,191	5,263	0,000	Signifikan
Budaya Organisasi → Pencegahan Fraud	0,163	4,356	0,000	Signifikan
Whistleblowing System → Pencegahan Fraud	0,157	4,078	0,000	Signifikan

Seluruh variabel independen memiliki koefisien positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Sistem pengendalian internal memiliki koefisien terbesar (0,191), diikuti good governance (0,179), budaya organisasi (0,163), dan whistleblowing system (0,157).

Temuan ini menunjukkan bahwa prosedur pengendalian, penilaian risiko, pemisahan tugas, otorisasi, dan pemantauan merupakan instrumen penting dalam menutup peluang terjadinya fraud. Hasil tersebut konsisten dengan kerangka pengendalian internal yang menekankan integrasi komponen pengendalian [4], [9].

Pengaruh positif good governance mengindikasikan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran membantu membatasi konflik kepentingan serta meningkatkan keterlacakan keputusan publik. Temuan ini mendukung argumen agency theory bahwa mekanisme pertanggungjawaban dapat mengurangi ruang perilaku oportunistik [3].

Budaya organisasi juga berpengaruh positif. Nilai integritas, kejujuran, kepatuhan, dan keteladanan pimpinan membentuk norma sosial yang menolak perilaku menyimpang. Budaya etis dapat menekan normalisasi pelanggaran dan memperkuat respons pegawai ketika menyaksikan tindakan yang tidak sesuai [10], [11].

Whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan. Saluran pelaporan yang dapat dipercaya meningkatkan kemungkinan penyimpangan diketahui dan ditindaklanjuti. Efektivitasnya bergantung pada kemudahan akses, kerahasiaan, perlindungan pelapor, serta kepastian tindak lanjut. Literatur menunjukkan bahwa kanal pelaporan merupakan salah satu mekanisme penting dalam pengungkapan fraud organisasi [6], [7], [12].

Pengujian Efek Moderasi

Tabel 6. Hasil pengujian moderasi penalaran moral

Interaksi	Koefisien	t-statistik	p-value	Interpretasi
Z × Whistleblowing System	0,080	2,630	0,009	Signifikan; memperkuat
Z × Sistem Pengendalian Internal	-0,061	2,098	0,036	Signifikan; memperlemah
Z × Good Governance	-0,044	1,576	0,115	Tidak signifikan
Z × Budaya Organisasi	-0,055	2,087	0,037	Signifikan; memperlemah

Penalaran moral memperkuat hubungan whistleblowing system dengan pencegahan fraud. Koefisien interaksi positif sebesar 0,080 (t=2,630; p=0,009) menunjukkan bahwa aparatur dengan penalaran moral lebih tinggi cenderung mengoptimalkan saluran pelaporan ketika menemukan indikasi penyimpangan. Penalaran moral memberi dasar etis untuk menyampaikan laporan demi kepentingan publik, sedangkan sistem pelaporan menyediakan saluran institusional untuk menindaklanjuti informasi. Temuan ini sejalan dengan kajian mengenai moral reasoning dan intensi whistleblowing [8], [13].

Interaksi penalaran moral dan sistem pengendalian internal bernilai negatif serta signifikan (-0,061; t=2,098; p=0,036). Arah negatif menunjukkan efek moderasi yang memperlemah kekuatan hubungan positif pengendalian internal dengan pencegahan fraud. Hasil ini tidak berarti penalaran moral menurunkan pencegahan fraud. Interpretasi yang lebih tepat adalah kemungkinan efek substitusi: ketika aparatur telah memiliki standar moral internal yang kuat, kontribusi tambahan dari mekanisme pengendalian formal terhadap perilaku pencegahan menjadi relatif lebih kecil. Pengendalian internal tetap diperlukan sebagai sistem organisasi dan tidak dapat digantikan oleh moralitas individu.

Penalaran moral tidak memoderasi hubungan good governance dengan pencegahan fraud (-0,044; t=1,576; p=0,115). Dengan demikian, pengaruh tata kelola terhadap pencegahan fraud dalam sampel ini tidak terbukti berubah secara signifikan menurut tingkat

penalaran moral. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas bekerja melalui aturan, struktur kewenangan, dan prosedur yang berlaku bagi seluruh aparatur, sehingga efeknya tidak bergantung secara kuat pada variasi moral individu.

Interaksi penalaran moral dan budaya organisasi juga signifikan dengan koefisien negatif (-0,055; t=2,087; p=0,037). Temuan ini mengindikasikan efek substitusi antara kontrol sosial yang dibentuk budaya organisasi dan kontrol internal yang bersumber dari penalaran moral. Ketika individu telah memiliki pertimbangan moral yang kuat, pengaruh tambahan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud dapat menjadi lebih kecil. Karena itu, koefisien negatif tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa budaya organisasi yang baik merugikan pencegahan fraud.

Secara keseluruhan, hasil moderasi memperlihatkan bahwa peran penalaran moral bersifat kontekstual. Penalaran moral memperkuat fungsi whistleblowing system, tetapi memperlemah besaran hubungan sistem pengendalian internal dan budaya organisasi dengan pencegahan fraud. Penalaran moral tidak terbukti memoderasi hubungan good governance. Temuan ini menegaskan bahwa strategi anti-fraud tidak cukup mengandalkan satu instrumen; organisasi perlu mengintegrasikan kontrol formal, saluran pelaporan yang aman, budaya integritas, dan pembinaan etika aparatur.

KESIMPULAN

Penelitian pada 32 OPD Kota Ternate dengan 130 kuesioner yang dapat diolah menunjukkan bahwa good governance, sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Sistem pengendalian internal memiliki koefisien pengaruh langsung terbesar di antara keempat prediktor. Model penelitian memiliki nilai R^2 sebesar 0,925 dan adjusted R^2 sebesar 0,919. Penalaran moral terbukti memoderasi hubungan whistleblowing system dengan pencegahan fraud secara positif. Penalaran moral juga memoderasi hubungan sistem pengendalian internal dan budaya organisasi secara signifikan dengan arah negatif, yang dapat mengindikasikan efek substitusi antara kontrol formal atau sosial dan kontrol moral internal. Sebaliknya, penalaran moral tidak memoderasi hubungan good governance dengan pencegahan fraud. Implikasi praktis penelitian adalah perlunya penguatan pengendalian internal, tata kelola yang akuntabel, budaya integritas, perlindungan pelapor, dan pendidikan etika aparatur secara terpadu. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek dan jumlah responden serta menguji faktor lain seperti ethical leadership, fraud awareness, dan ethical climate.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE), *Occupational Fraud 2024: A Report To The Nations*. Austin, TX, USA: ACFE, 2024. [Online]. Available: Https://Www.Acfe.Com/En-Us/-/Media/Files/Acfe/Pdfs/Rttn/2024/2024-Report-To-The-Nations.Pdf

[2] Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2024*. Berlin, Germany: Transparency International, 2025. [Online]. Available: Https://Www.Transparency.Org/En/Publications/Corruption-Perceptions-Index-2024

[3] M. C. Jensen And W. H. Meckling, “Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure,” *Journal Of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, Pp. 305–360, 1976, Doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X.

[4] Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission (COSO), *Internal Control—Integrated Framework: Executive Summary*. Durham, NC, USA: COSO, 2013.

[5] L. Kohlberg, “Stage And Sequence: The Cognitive-Developmental Approach To Socialization,” In *Handbook Of Socialization Theory And Research*, D. A. Goslin, Ed. Chicago, IL, USA: Rand Mcnally, 1969, Pp. 347–480.

[6] J. P. Near And M. P. Miceli, “Effective Whistle-Blowing,” *Academy Of Management Review*, Vol. 20, No. 3, Pp. 679–708, 1995.
[7] A. Dyck, A. Morse, And L. Zingales, “Who Blows The Whistle On Corporate Fraud?” *The Journal Of Finance*, Vol. 65, No. 6, Pp. 2213–2253, 2010, Doi: 10.1111/J.1540-6261.2010.01614.X.
[8] J. Macgregor And M. Stuebs, “The Effects Of Moral Reasoning And Corporate Ethical Climate On Whistleblowing Intentions,” *Journal Of Business Ethics*, Vol. 122, No. 3, Pp. 525–536, 2014.
[9] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, And M. Sarstedt, *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 3rd Ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2022.
[10] M. Kaptein, “From Inaction To External Whistleblowing: The Influence Of The Ethical Culture Of Organizations On Employee Responses To Observed Wrongdoing,” *Journal Of Business Ethics*, Vol. 98, No. 3, Pp. 513–530, 2011.
[11] B. E. Ashforth And V. Anand, “The Normalization Of Corruption In Organizations,” *Research In Organizational Behavior*, Vol. 25, Pp. 1–52, 2003.
[12] E. Johansson And P. Carey, “Detecting Fraud: The Role Of The Anonymous Reporting Channel,” *Journal Of Business Ethics*, Vol. 139, No. 2, Pp. 391–409, 2016.
[13] P. Alleyne, T. Charles-Soverall, T. Broome, And A. Pierce, “Perceptions, Predictors And Consequences Of Whistleblowing Among Accounting Employees In Barbados,” *Meditari Accountancy Research*, Vol. 26, No. 3, Pp. 437–466, 2018.
[14] M. Ibrahim, P. Nurmayanti, And N. Indrawati, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Budaya Organisasi Dan Anti-Fraud Awareness Terhadap Pencegahan Fraud,” *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, Vol. 4, No. 1, Pp. 117–132, 2023, Doi: 10.31258/Current.4.1.117-132.
[15] A. Pomanto, M. Mahdalena, And S. P. Husain, “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Perusahaan XYZ),” *SEIKO: Journal Of Management & Business*, Vol. 7, No. 2.1, 2024. [Online]. Available: Https://Journal.Stieamkop.Ac.Id/Index.Php/Seiko/Article/View/8014
[16] J. B. Suh, R. Nicolaides, And R. Trafford, “The Effects Of Moral Intensity, Ethical Culture, And Ethical Leadership On Anti-Fraud Strategies,” *Journal Of Financial Crime*, Vol. 26, No. 3, Pp. 849–865, 2019.
[17] M. Kaptein, “Developing And Testing A Measure For The Ethical Culture Of Organizations: The Corporate Ethical Virtues Model,” *Journal Of Organizational Behavior*, Vol. 29, No. 7, Pp. 923–947, 2008, Doi: 10.1002/Job.520.
[18] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, And M. Sarstedt, *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*, 4th Ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications, 2026.
[19] Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD), *G20/OECD Principles Of Corporate Governance*. Paris, France: OECD Publishing, 2015.
[20] J. P. Near And M. P. Miceli, *Blowing The Whistle: The Organizational And Legal Implications For Companies And Employees*. Lexington, MA, USA: Lexington Books, 1992.